PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020

Analysis Of Single Candidate Pairs In The 2020 Pematang Siantar City Regional Head Election

Gary Timothy Hasian Purba, Subhilhar* & Hatta Ridho

Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 04 Agustus 2021; Direview: 04 Agustus 2021; Disetujui: 29 Desember 2021

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah Kota Pematang Siantar tahun 2020. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa terjadi pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar. Legalitas Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XII/2015 merupakan kekuatan hukum untuk menegakkan makna demokrasi dalam konstestasi politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Disamping itu esensi demokrasi yang menjanjikan kebebasan untuk dipilih dan memilih merupakan kekuatan tambahan untuk memunculkan pasangan calon tunggal. Kegagalan kaderisasi partai politik menjadi pemicu lain untuk menghadirkan munculnya pasangan calon tunggal dalam pemilu. Tidak hanya di Kota Pematang Siantar tetapi juga diseluruh Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan instrumen interview yang melibatkan pengurus partai politik dan pengamat politik di Kota Pematang Siantar disamping referensi mengenai pasangan calon tunggal. Lemahnya kaderisasi partai politik dengan hadirnya borong partai membuat petahana tidak mendapat dukungan di Kota Pematang Siantar. Kekuatan hukum keputusan Mahkamah Konstitusi dan makna demokrasi untuk dipilih dan memilih menjadikan pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar memenangkan pemilu. Kata Kunci: Demokrasi; Pasangan Calon Tunggal; Keputusan Mahkamah Konstitusi; Partai Politik; Pemilu.

Abstrak

The purpose of this study was to analyze a single candidate pair in the regional head election of Pematang Siantar City in 2020. The purpose of this study was to explain why there was a single candidate pair in Pematang Siantar City. The legality of the Constitutional Court Decision number 100/PUU-XII/2015 is a legal force to uphold the meaning of democracy in political contestation, in this case regional head elections. Besides that, the essence of democracy which promises freedom to be elected and to vote is an additional power to bring up a single candidate pair. The failure to regenerate political parties is another trigger for the emergence of a single candidate pair in the post-conflict local election. Not only in Pematang Siantar City but also throughout Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative with interview instruments involving political party administrators and political observers in Pematang Siantar City in addition to references to single candidate pairs. The weak cadre of political parties with the presence of wholesale parties makes incumbents not get support in Pematang Siantar City. The legal power of the Constitutional Court's decision and the meaning of democracy to be elected and voted made the single candidate pair in Pematang Siantar City win the post-conflict local election against an empty box.

Keywords: Democracy; Single Candidate Pair; Decision of the Constitutional Court; Political Parties; Local Election.

How to Cite: Purba, G.T.H., Subhilhar & Ridho, H., (2022). Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020. *PERSPEKTIF*, 10 (2): 298-317.

*Corresponding author:
E-mail: subhilhar@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Kota Pematang Siantar mengalami penundaan selama setahun. Penundaan ini tentu menghadirkan beberapa persoalan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di mana penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU Kota Pematang Siantar melakukan pencoretan terhadap pasangan salah satu peserta karena tidak lengkapnya syarat pencalonan administrasi. Kendala ini yang melibatkan adanya proses hukum memengaruhi jalannya pemilukada di Kota Pematang Siantar.

Dari persoalan di atas dapat dipahami bahwa penundaan tersebut menegaskan adanya kekurangan pemahaman atas perundangan-undangan administrasi pemilihan umum dan pencalonan pemilihan kepala daerah terutama dukungan dari partai politik yang bermasalah sehingga calon gagal mengikuti pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Pematang Siantar di tahun 2015. Kejadian ini tentu mencederai nafas demokrasi yang adil dan beradab dan tidak menghargai hak politik individu yang dipilih dan memilih.

Pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama dilakukan tanggal 9 desember 2015 termasuk Kota Pematang Siantar. Masyarakat Kota Pematang Siantar memiliki antusiasme yang besar dengan hadirnya lima calon yakni Sujito dan Djumadi SH, Hulman Sitorus SE dan Hefriansyah (Partai Demokrat), Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba (Partai Nasdem, Hanura, PAN), Wesly Silalahi SH, M.Kn dan H.Sailanto (PDIP, PKS, PKPI), Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga (Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP). Dari lima calon ini satu pasangan calon yaitu Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga tidak diikutsertakan sebagai peserta dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar.

Penundaan pemilihan kepala daerah tidak hanya terjadi di Kota Pematang Siantar. Komisi Pemilihan Pusat pada tanggal 8 desember 2015 mengeluarkan sebuah pernyataan menunda pilkada serentak di lima daerah yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kota Pematang Siantar. Penundaan ini merupakan tindak lanjut surat KPU pusat kepada KPU Kota Pematang Siantar menyusul adanya putusan sela dari PTUN

Medan atas gugatan pasangan calon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga.

Adanya fakta sengketa tentang pencalonan wali kota dan wakil wali kota yang menggugurkan tidak ikut pemilihan, Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan sesuatu instruksi kepada KPUD Kota Pematang Siantar untuk menunda pemilihan kepala daerah Kota Pematang Siantar. Pencoretan yang dilakukan KPUD Kota Pematang Siantar didasarkan pada tidak sahnya surat dukungan dari salah satu partai pengusung yakni Golkar yang pada saat itu mengalami dualisme internal pengurus

(<http://www.siantarnews.co/topik/masalah/165/pilkada-serentak-2015> diakses pada 29 april 2021 pukul 20.56.wib).

Penundaan pemilihan kepala daerah memakan waktu setahun sejak keluarnya surat Komisi Pemilihan Pusat kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar. Kemelut atau pertikaian atas penundaan ini menyebabkan terjadinya pemecatan terhadap tiga anggota panitia pengawas pemilu (panwaslu) Kota Pematang Siantar karena dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Sengketa pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga yang diusung partai Golkar versi Aburizal Bakrie, Partai Gerindra, dan PPP memutuskan agar KPU Kota Pematang Siantar menetapkan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar (<http://regional.kompas.com/read/2015/11/18/05013581/Tiga.Anggota.Panwaslu.Siantar>. Diberhentikan diakses pada kamis 29 april 2021 pukul 21.05).

Putusan tingkat banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam sengketa pilkada Kota Pematang Siantar membuat KPU Kota Pematang Siantar mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun pengajuan kasasi KPU Kota Pematang Siantar yang mendapat persetujuan lisan dari KPU Provinsi Sumut dikalahkan dan penggugat Surfenov dimenangkan melalui putusan PTUN Medan. Dalam putusan PTUN Medan KPU Siantar diperintahkan untuk menetapkan kembali Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar tahun 2015 (<http://www.hetanews.com/article/59278/hari-ini-kpud-siantar-daftarkan-kasasi-ke-ptun->

medan diakses pada Kamis 29 April 2021 pukul 21.13 WIB.).

Pelaksanaan pilkada Kota Pematang Siantar akhirnya dilaksanakan pada tahun 2016 dengan pasangan pemenangnya adalah Hulman Sitorus sebagai Wali Kota dan Hefriansyah sebagai Wakil Wali Kota. Sebelum pelantikan, Hulman Sitorus meninggal dunia maka pelantikan dilaksanakan pada tahun 2017 di mana wakil wali kota menjadi wali kota. Dalam hal ini masa jabatan wali kota Pematang Siantar berakhir pada tahun 2022. Keunikan pelaksanaan pilkada langsung harus dilaksanakan pada tahun 2020 karena merujuk pada aturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.

Durasi kepemimpinan kepala daerah Kota Pematang Siantar menjadi rancu dikarenakan terbatasnya jabatan di mana pelaksanaan pilkada langsung akan dilaksanakan pada tahun 2024. Kalkulasi waktu untuk durasi jabatan pemenang pemilu pada tahun 2020 untuk Kota Pematang Siantar hanya mengemban tugas selama dua tahun yakni dari 2021 hingga 2024. Hal ini merupakan sebuah keunikan kenapa bisa terjadi adanya keinginan untuk duduk sebagai pemimpin kepala daerah dengan batas waktu dua setengah tahun. Keunikan lainnya adalah ketidaksediaan individu untuk duduk dua tahun yang memungkinkan munculnya pasangan calon tunggal. Disisi lain kesediaan untuk mengabdikan sebagai pemimpin kepala daerah dalam membangun Kota Pematang Siantar merupakan alasan lain yang memungkinkan hadirnya pasangan calon tunggal untuk pilkada Kota Pematang Siantar.

Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (seterusnya ditulis pilkada) sebagai keputusan dinamika politik di Indonesia yang melahirkan sesuatu konsep demokrasi yang berbeda dari sebelumnya. Demokrasi yang sebelumnya merupakan bentuk demokrasi tidak langsung di mana pemilihan dilakukan melalui perwakilan yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di mana pelaksanaan pilkada dapat dilakukan setiap tahun. Adanya perubahan dinamika politik dalam era reformasi, pilkada dilaksanakan secara serentak di mana terdapat sesuatu yang berbeda dalam pemilihan kepala daerah dengan munculnya pasangan calon tunggal.

Pelaksanaan pilkada merupakan bentuk demokrasi di mana pemilihan dilakukan sesuai

dengan kehendak rakyat. Konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata "rakyat berkuasa" atau "government or rule by the people". Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan atau berkuasa (Huda, Ni'matul dan M Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3). Dari penjelasan ini dapat disarikan bahwa rakyat menjadi pemilik kekuasaan dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan kata lain banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi mencakup dua aliran penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya komunisme. Perbedaan fundamental di dalam dua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara (*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter (Huda, dan Nasef. 2017).

Pada prinsipnya demokrasi tidak memikat manusia untuk saling dekat secara bersama-sama, namun demokrasi menjadikan manusia itu memiliki kebiasaan untuk saling berhubungan lebih dekat dengan asas saling menghargai melalui kesetaraan hak baik untuk memilih atau dipilih dalam konteks pemilihan. Keberadaan calon tunggal mengakibatkan peniadaan kontestasi yang sepertinya menjadi aneh dalam demokrasi yang membutuhkan adanya kompetisi. Seiring perjalanan waktu fenomena calon tunggal pada pemilihan umum kepala daerah serentak mewarnai suhu politik di Indonesia. Hal ini bermula pada tahun 2015 dengan terdapatnya 3 daerah dan tahun 2017 terdapat 9 daerah. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk memajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon saja (Yunus, 2017).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematang Siantar diperluas menjadi 6 wilayah kecamatan, di mana 9 desa/kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Kota

Pematang Siantar, sehingga Kota Pematang Siantar terdiri dari 38 desa/kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70.230 Km². Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Siantar Barat; Kecamatan Siantar Timur; Kecamatan Siantar Utara; Kecamatan Siantar Selatan; Kecamatan Siantar Marihat; Kecamatan Siantar Martoba; Kecamatan Siantar Marimbun; Kecamatan Siantar Sitalasari.

Dengan demikian jumlah Kecamatan di Kota Pematang Siantar ada sebanyak 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 53 (lima puluh tiga) kelurahan. Pada tabel berikut ini dicantumkan para pejabat Wali Kota KDH yang penuh memegang tampuk pimpinan di Kota Pematang Siantar sampai sekarang. Kepala daerah untuk wali kota yang terakhir di Pematang Siantar Ir Asner Silalahi MT merupakan calon pasangan tunggal untuk Wali Kota Pematang Siantar 2020-2024. Kemenangan Asner Silalahi MT bersama dengan dr. Susanti Dewayani Sp.A merupakan sejarah baru dalam perjalanan pilkada serentak untuk daerah Pematang Siantar. Fenomena ini menjadi sesuatu yang unik dalam masyarakat Pematang Siantar yang multikultural namun dapat menerima calon pemimpin daerah khususnya wali kota dalam pilkada secara langsung dalam bentuk calon tunggal. Fenomena ini juga yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dititikberatkan pada calon tunggal untuk pilkada secara serentak khususnya untuk pemerintahan Kota Pematang Siantar. Meskipun kemenangan Ir Asner Silalahi MT sebagai calon tunggal untuk wali kota tidak dapat dilantik karena beliau telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum pelantikannya terjadi.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti Indra Syahril dan Dadan Herdiana, menemukan bahwa munculnya calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2018 di beberapa daerah pemilihan di Indonesia memiliki penyebab yang berbeda-beda namun sumber persoalannya adalah sama yaitu tidak ditetapkannya ambang batas atau syarat dukungan dari partai politik sehingga terjadi "aksi borong dukungan" partai politik. Masyarakat merasa kecewa terhadap partai politik karena berkhianat kepada suara konstituen sehingga masyarakat pemilih di Kota Makassar ramai-ramai memilih kotak kosong (Syahril dan Herdiana, 2020). Tony Yuri Rakhmanto menyatakan dalam

penelitiannya, bahwa salah satu perspektif HAM untuk pemilihan kepala daerah adalah adanya jaminan penyelenggaraan dengan tersedianya peluang bagi peserta dalam hal ini pasangan calon dan masyarakat dapat memanifestasikan kedaulatannya untuk melaksanakan haknya, baik untuk hak memilih maupun hak untuk dipilih (Rahmanto, 2018).

Ayu Lestari, Ridwan, dan Iza Rumesten RS meneliti mengenai Faktor Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa salah satu bentuk demokratisasi adalah pemilihan umum di mana Indonesia yang menganut sistem demokrasi sebagai suatu negara dalam menjalankan pemerintahan menyelenggarakan pemilihan umum. Kemenangan kotak kosong terhadap calon tunggal merupakan suatu bentuk hukuman karena kekecewaan masyarakat yang memunculkan ketidakpercayaan terhadap calon tunggal (Lestari, Ridwan, dan Rumesten).

Teguh Ilham dalam penelitiannya menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki kelebihan dalam aspek posisi, baik sebagai petahana atau keluarganya, ataupun karena kemampuan finansial yang tinggi sehingga mereka mampu untuk menarik partai politik. Di lain sisi partai politik sebagai pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kaderisasi dan pendidikan politik terjebak pada pragmatisme politik yang hanya fokus pada kekuasaan tanpa melakukan usaha untuk melakukan fungsinya. Calon tunggal juga bermasalah dari aspek fairness karena pesaingnya, yaitu kotak kosong tidak diberikan hak dan kewajiban yang serupa seperti kampanye bagi para pendukungnya (Ilham, 2020). Penelitian Iza Rumesten RS, menegaskan bahwa Pilkada serentak menunjukkan adanya dinamika demokrasi di tanah air sebagai pertanda kemajuan dan cerdasnya masyarakat dalam berpolitik. Pilkada serentak bulan desember 2015, lahirnya calon tunggal tidak diprediksi oleh pembuat undang-undang. Penelitian ini mencari tau bagaimana langkah hukum untuk mencegah lahirnya calon tunggal pada pilkada (Rumesten, 2016). Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati, menyatakan bahwa secara filosofis pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Keputusan Mahkamah Konstitusi

nomor 100/PUU-XII/2015 perlu disikapi pemangku kepentingan untuk tetap menjaga proses pemilihan berlangsung secara demokratis. Oleh karena itu pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal perlu dikawal sehingga pemilihan tetap berlangsung secara demokratis (Anwar dan Saraswati, 2019).

Melihat beberapa penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pemilukada di Kota Pematang Siantar sebagai prosedur dari proses demokrasi khususnya mengenai pemilihan kepala daerah untuk pasangan calon tunggal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XII/2015 sebagai dasar konstitusional yang menjamin hak individu untuk hadir sebagai pasangan calon tunggal dalam mewujudkan pemilukada yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menemukan penyebab tidak munculnya kader dari partai politik yang mumpuni untuk menghadirkan kontestasi pemilukada yang demokratis dalam pengertian adanya kompetisi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Yang pertama lebih bersifat deskriptif atau menjabarkan, sedangkan yang kedua lebih berkuat pada angka. Bruce L Berg mengutip pendapat Dabbs (1982) menyuarakan bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif tidaklah berbeda. Namun dalam bidang ilmu sosial orientasi kuantitatif sering dianggap lebih akurat karena berkaitan dengan angka (Berg, 2004).

Dalam tradisi penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sesederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif, karena sebelum hasil-hasil penelitian kualitatif memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati itu (Bungin, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa pencatatan peneliti maupun fakta sebab data adalah segala fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Keperluan dalam tesis ini mencakup fenomena pasangan calon tunggal yang terjadi di dalam pemilihan langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau metode interview. Wawancara dalam hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan tentang pemilihan langsung kepala daerah Kota Pematang Siantar. Interview ini dimaksudkan untuk mendapat keterangan dari masyarakat maupun dari orang-orang yang mewakili partai politik yang berkaitan dengan pilkada langsung di Kota Pematang Siantar. Dalam mengumpulkan data baik dari individu tertentu untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan mengenai apa yang diteliti.

Penelitian dalam tesis ini menggunakan wawancara mendalam yang mencakup informan dan responden untuk mengumpulkan data berupa informasi yang berkaitan dengan pilkada langsung di Kota Pematang Siantar. Disamping itu peneliti juga menggunakan metode observasi partisipasi dengan cara mencatat apa yang diamati khususnya yang berkaitan dengan topik peneliti. Sebagai tambahan untuk pengumpulan data peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa keputusan-keputusan perundang-undangan mengenai pemilu dan pilkada langsung kepala daerah. Data dicatat dengan cermat dengan ketiga metode ini untuk kesahihan pengumpulan data sebagai informasi yang akan digambarkan atau dijelaskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pasangan Calon Tunggal di Kota Pematang Siantar

Dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil untuk pilkada 2020 di Kota Pematang Siantar memulai dengan adanya Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang sangat krusial dan sangat strategis dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bawaslu Kota Pematang Siantar berkomitmen kuat untuk melakukan

pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik agar tercipta daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini. Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih merupakan dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil berdasarkan Indeks

Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan oleh Bawaslu RI.

Bawaslu Kota Pematang Siantar membuat perencanaan pengawasan untuk masa tahapan pemutakhiran data pemilih. Adapun perencanaan pengawasan yang dibuat Bawaslu Kota Pematang Siantar adalah:

Tabel 1

Kalender Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

NO	Kegiatan Pengawasan Sub Tahapan	Waktu pelaksanaan	Pelaksana Pengawasan
1	Pemutakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)	15 Juli s.d 13 Agustus 2020	Bawaslu Kota Pematangsiantar, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan
2	Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	5 September s/d 14 September 2020	Bawaslu Kota Pematangsiantar
3	Pengumuman DPS	19 s/d 28 September 2020	Bawaslu Kota Pematangsiantar, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan
4	Perbaikan DPS	29 September s/d 3 Oktober 2020	Bawaslu Kota Pematangsiantar
5	Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	4 s/d 9 Oktober 2020	Bawaslu Kota Pematangsiantar
6	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	9 s/d 16 Oktober 2020	Bawaslu Kota Pematangsiantar
7	Pengumuman DPT	28 Oktober s/d 6 Desember 2020	Bawaslu Kota Pematangsiantar, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan

Sumber: Data Bawaslu Kota Pematang Siantar

Pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih yang dilakukan Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan pencocokan penelitian data dan daftar pemilih dengan jajaran KPU untuk menyusun dan merekapitulasi daftar pemilih, mengkaji dan menganalisa data dalam daftar pemilih, memberikan rekomendasi terhadap kesalahan, kekeliruan dan temuan kepada KPU dan jajarannya, dan membuka posko penerimaan pengaduan daftar pemilih. Terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU RI mengeluarkan surat edaran tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan dengan dua bentuk yaitu (1) bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan dan bagi daerah yang melaksanakan pemilihan maka kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak tahun 2020, (2) dengan teknis yang dimulai daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu/pemilihan terakhir yang disandingkan dengan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) dari pemerintah untuk kemudian pada saat waktu yang tepat dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP (Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih) (SE KPU RI Nomor 181/PL 02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020. Hlm 13).

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan mengalami penundaan dikarenakan adanya wabah pandemi covid 19 yang berdampak juga terhadap penundaan pilkada. Penundaan pilkada ini tidak hanya terjadi di Kota Pematang Siantar tetapi diseluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia (SK BNPB Nomor 13.A tahun 2020. Hlm 16) dan surat Badan Pengawas pemilihan umum Republik Indonesia perihal Antisipasi Dampak Virus Covid 19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tahun 2020 (Surat Bawaslu RI Nomor S-0235/K. Bawaslu/PM.00.00/2020.), maka KPU RI menerbitkan surat keputusan tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020

dalam upaya pencegahan covid 19 (SK KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU III/ 2020.).

Penundaan pilkada akibat virus corona pemerintah selanjutnya menerbitkan Perppu nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Presiden Jokowi telah menandatangani perppu nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perppu yang ditandatangani pada tanggal 4 mei 2020 menjelaskan pelaksanaan pilkada serentak 2020 ditunda hingga desember 2020 karena bencana non alam berupa wabah virus corona (covid 19) (<https://nasional.kontan.co.id/newsberita/pilkada-ditunda-desember-jokowi-teken-perppu-nomor-22020>. diakses pada 8 mei 2021 pukul 12.27 wib.).

Menyikapi kebijakan yang dilakukan pemerintah, KPU Kota Pematang Siantar menerbitkan berita acara Nomor: 39/PL.02-BA/1272/KPU-kot/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar tahun 2020 Dalam Upaya pencegahan dan Penyebaran Covid 19. Bawaslu Kota Pematang Siantar melakukan pengawasan terhadap Penundaan Tahapan Pilkada 2020 Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Rapat Kordinasi bersama KPU dan Bawaslu Kota Pematang Siantar. Bawaslu, Hlm 17.).

Sesuai dengan PERPPU tahun 2020 disebutkan bahwa pemungutan suara untuk pilkada lanjutan yang tertunda akibat pandemi covid 19 dilaksanakan pada bulan desember 2020. Berdasarkan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah mulai tanggal 15 juni 2020. Tahapan pilkada sebelumnya yang tertunda selama hampir 3 bulan KPU Kota Pematang Siantar menerbitkan surat keputusan nomor 48/PL.02/KPT-Kot/VI/2020 tentang penetapan pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar lanjutan tahun 2020 dan menerbitkan surat

keputusan nomor: 47/pp.01.02/kpt/1272/kpu-kot/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas keputusan nomor 55/pp.01.02/kpt/1272/kpu-kot/X/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kot Pematang Siantar tahun 2020.

Setelah melakukan perbaikan dalam arti pemutakhiran data maka rekapitulasi pemutakhiran data di Kota Pematang Siantar, KPU Kota Pematang Siantar memberikan kesempatan kepada Bawaslu dan perwakilan parpol serta disdukcapil untuk memberikan masukan dan tanggapan. KPU Kota Pematang Siantar membuat berita acara nomor 83/PL.02.1-BA/1272/KPU-KOT-2020 tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemutakhiran sekaligus perbaikan DPS oleh PPS tanggal 29 september sampai dengan 3 oktober tahun 2020. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pematang Siantar dapat dirincikan bahwa DPT pilkada Kota Pematang Siantar tahun 2020 berjumlah 180.490. orang yang terdiri dari 87.127 laki-laki dan 30.363 perempuan. Pemutakhiran data tersebut dilakukan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar yang dilakukan sekaligus pengawasan. Bawaslu Kota Pematang Siantar dan Panwas Kecamatan menjelaskan akurasi daftar pemilih. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bawaslu Kota Pematang Siantar tidak menemukan bentuk pelanggaran dalam rekapitulasi daftar pemilih.

Setelah Bawaslu mengevaluasi pelaksanaan pengawasan tahap pemutakhiran data dan daftar pemilih Bawaslu Kota Pematang Siantar memetakan potensi kerawanan yang diperkirakan muncul selama proses pencalonan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar pada pilkada 2020. Tidak dapat dimungkiri kemungkinan munculnya beberapa permasalahan yang dikhawatirkan berpotensi terjadi selama masa pencalonan. Oleh karena itu Bawaslu Kota Pematang Siantar menyusun kerawanan di dalam tahapan pencalonan perseorangan dan jalur partai politik.

Tahapan pencalonan pasangan calon perseorangan dan pasangan calon partai politik pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 merupakan salah satu tahapan sangat krusial dan rawan terjadi pelanggaran. Mengacu pada pilkada tahun 2016 di Kota Pematang Siantar mengalami penundaan

akibat terjadinya tuntutan pasangan calon yang tidak diikutsertakan oleh KPU atas dasar masalah administrasi, munculnya dualisme kepemimpinan Partai Golkar untuk pasangan Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga.

Berdasarkan hasil penelitian awal sejumlah potensi kerawanan pencalonan yang dimungkinkan muncul diantaranya adalah pemalsuan dokumen persyaratan, verifikasi berkas pencalonan tidak dilakukan sesuai prosedur, penyelenggaraan pemilu tidak netral, perubahan aturan yang cukup cepat, teknis pelaksanaan tes kesehatan untuk calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar. Berkaitan dengan ini pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pematang Siantar mencakup pengawasan langsung berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen, kebenaran dan keabsahan dokumen, persyaratan pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar tahun 2020. Pengawasan dengan perhatian ekstra terhadap daftar calon perseorangan maupun calon dari partai politik karena kelengkapan perbaikan daftar calon dan syarat calon memungkinkan terjadinya pelanggaran pada tahap ini.

Berdasarkan surat keputusan KPU Kota Pematang Siantar nomor 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali kota Pematang Siantar Tahun 2020. KPU Kota Pematang Siantar menetapkan jumlah minimum dukungan penyerahan dan persebaran pasangan calon perseorangan peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2020 sebanyak 17.910 orang atau 10% dari jumlah pemilih terakhir pada pemilihan umum tahun 2019. Selanjutnya KPU Kota Pematang Siantar mengumumkan jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan

bakal calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota nomor 2530/PL.02.2-Pu/1272/KPU-Kot/XII/2019 tentang pengumuman penyerahan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan wali kota Pematang Siantar.

Penyerahan syarat dukungan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar kepada KPU Kota Pematang Siantar dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020 - 23 Februari 2020. Pada tanggal 23 februari 2020 atau hari terakhir penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Kota Pematang Siantar, bakal pasangan calon perseorangan atas nama Ozak Naibaho S.H dan M. Efendi Siregar menyerahkan syarat dukungan dan sebaran pada pukul 14.40 wib di KPU Kota Pematang Siantar. Jumlah dukungan *hard copy* berjumlah 19.254 yang tersebar di 8 kecamatan yang tertera pada SILON KPU.

Dalam hal menghitung dan pengecekan dokumen jumlah dukungan dan sebaran KPU Kota Pematang Siantar menyiapkan 8 meja pemeriksaan yang tiap-tiap mejanya terdiri dari 1 kecamatan. Dalam proses pemeriksaan tersebut terlibat juga 3 unsur yakni unsur: KPU Kota Pematang Siantar, Bawaslu Kota Pematang Siantar, dan Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Setelah dokumen-dokumen pasangan calon bakal diterima maka tindakan pelaksanaan verifikasi dilakukan. Pada tanggal 27 februari 2020 - 25 maret 2020 di kantor KPU Kota Pematang Siantar dilaksanakan verifikasi. Bawaslu Kota Pematang Siantar tetap melakukan pengawasan secara melekat terhadap KPU Kota Pematang Siantar dalam verifikasi administrasi tersebut. Akhirnya tahapan verifikasi administrasi diperoleh hasil seperti dianggram Gambar 1.

Gambar 1
Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Calon Perseorangan
Sumber: Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi.

Berdasarkan Gambar 1, dapat dipahami bahwa jumlah keseluruhan dukungan yang diverifikasi administrasi sebanyak 19.145 dukungan dengan rincian jumlah yang tidak memenuhi syarat sebanyak 95 dukungan dan jumlah dukungan yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 19.050 dukungan. Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data dukungan, KPU Kota

Pematang Siantar memverifikasi sesuatu yang berbeda dengan DPT Pemilu. Pendukung yang terdaftar dalam DPT Pemilu atau pemilihan terakhir sebanyak 18.702. dukungan dan pendukung yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu atau pemilihan terakhir sebanyak 348 dukungan.

Gambar 2
Hasil Verifikasi Kesesuaian Data Dukungan dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir/ atau DP4
Sumber: Berita acara verifikasi administrasi.

Pelaksanaan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar di tingkat kecamatan Se-Kota Pematang Siantar dilaksanakan pada 16 juli 2020 di masing-masing kantor kecamatan Kota Se-Pematang Siantar. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS adalah sebagai berikut.

Dari hasil wawancara peneliti yang bisa dijadikan catatan penting perihal pasangan calon untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 di Kota Pematang Siantar terkesan menawarkan syarat yang cukup rumit untuk dipenuhi yaitu dengan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebesar 17.910 jiwa. Sementara bakal pasangan calon perseorangan atas nama Ozak Naibaho dan M Efendi Siregar menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Kota Pematang Siantar. Dari tabel di atas jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sebanyak 8.692 orang sehingga membutuhkan setidaknya dukungan pendukung suara sebesar 18.442 orang. Berdasarkan rentang waktu dan banyaknya jumlah pendukung suara yang hendak didapatkan sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan.

KPU Kota Pematang Siantar telah memberikan kesempatan kepada Bakal Pasangan Calon untuk menyerahkan syarat dukungan perbaikan mulai tanggal 25-27 juli 2020. Hingga pukul 24.00 wib di tanggal 27 juli 2020 bakal pasangan calon tidak datang menyerahkan syarat dukungan perbaikan pencalonan perseorangan. Dengan demikian KPU membuat berita acara nomor 1301/PL.02.2-BA/1272/KPU-Kot/VII/2020 tentang batas akhir penyerahan dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar. Hingga batas waktu yang sudah ditentukan pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar dari jalur perseorangan di Kota Pematang Siantar tidak ada.

KPU Kota Pematang Siantar membuka pendaftaran calon di ruang darma wanita PKK Kota Pematang Siantar. Bakal pasangan calon Ir. Asner Silalahi dan dr. Susanti Dewapayani Sp.A datang ke KPU Kota Pematang Siantar bersama dengan delapan partai yang mendukung pasangan tersebut. Penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar pada tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 september 2020 di kantor KPU Kota Pematang Siantar. KPU Kota Pematang Siantar menetapkan surat keputusan KPU Kota Pematang Siantar nomor

113/PL.02.2-KPT/1272/KPU-Kot/IX/2020 tentang penetapan pemilihan dengan satu (1) pasangan calon dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar tahun 2020.

Berhubung karena adanya pasangan calon tunggal di dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kota Pematang Siantar, KPU dan Bawaslu Pematang Siantar bersama paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar menandatangani fakta integritas untuk mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan pilkada tahun 2020. Dengan adanya keputusan KPU Pematang Siantar tersebut, pilkada yang digelar pada tanggal 9 desember 2020 paslon Ir Asner Silalahi dan dr. Susanti Dewapayani Sp.A akan berhadapan dengan kolom kosong.

Proses pelaksanaan calon tunggal untuk paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar tahun 2020 memiliki tahapan yang harus dipatuhi seperti dukungan partai politik, dukungan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan ketentuan persyaratan administrasi yang sudah ditetapkan oleh KPU untuk bisa diterima sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematang Siantar. Kehadiran Bawaslu Kota Pematang Siantar sebagai pengawas jalannya pilkada Kota Pematang Siantar bekerja sama dengan KPU menegaskan bahwa keberadaan calon tunggal di Kota Pematang Siantar untuk pasangan wali kota dan wakil wali kota telah memenuhi syarat. Dengan demikian kehadiran calon tunggal berhadapan dengan kolom kosong sudah sesuai dengan ketentuan yang pernah berasaskan pemilihan yang JUBERLUDIL sesuai dengan nafas demokrasi.

Kemenangan calon tunggal dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar didukung banyaknya partisipasi pemilih yang berkisar 63,80% yang meleset dari target KPU sebesar 77,5%. Kemenangan calon tunggal untuk pasangan Ir. Asner Silalahi dan dr. Susanti Dewapayani Sp.A berkisar 75,3% atau sama dengan 43.919 orang pemilih. Sementara untuk kotak kosong memperoleh suara berkisar 24,7% yang setara dengan 14.401 suara.

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Keputusan MK nomor 100/PUU-XIII/2015 yang didalamnya memiliki kemanfaatan dan kegunaan berbunyi menyatakan bahwa daerah yang hanya

memiliki satu pasangan calon kepala daerah dapat mengikuti pilkada serentak. Kemudian ditindaklanjuti penerbitan peraturan KPU RI nomor 14 tahun 2015 sebagai pedoman teknis pelaksanaan pilkada di Indonesia khususnya untuk mengakomodasi praktek pilkada Pasangan Calon tunggal tahun 2015.

Kehadiran kotak kosong sebagai pilihan alternatif masyarakat menyiratkan rakyat masih merupakan kekuatan untuk menentukan pilihan dalam konteks pemilu khususnya pemilukada langsung di setiap daerah. Demokrasi yang mengetengahkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sekali lagi menegaskan bahwa pilihan rakyat adalah keputusan mutlak dalam berdemokrasi. Kemenangan kotak kosong merupakan simbolik demokrasi bahwa rakyat mutlak memiliki kedaulatan dalam dinamika politik khususnya untuk menyuarakan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

Kota Pematang Siantar yang berada di Sumatera Utara dalam penyelenggara pemilukada serentak telah menghadirkan calon tunggal pertama kali di Kota Pematang Siantar. Pasangan calon tunggal atas nama Ir Asner Silalahi untuk Wali Kota dan Susanti dr. Dewayani Sp.A hadir sebagai calon tunggal dengan kedudukan wali kota dan wakil wali kota. Umumnya dalam sebuah kompetisi pemilihan kepala daerah dipahami sedikitnya dua pasangan calon yang berkompetisi. Hal yang terjadi di Indonesia terkhususnya di Kota Pematang Siantar terjadi hanya ada satu pasangan calon sebagai peserta pemilihan sebagai batas akhir pendaftaran.

Dari pengamatan yang dilakukan melalui wawancara oleh peneliti ditemukan fakta ada beberapa nama yang menjadi bakal calon wali kota yang sudah memasang baliho untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon. Lebih unik nya bakal calon ini didukung oleh partai politik seperti Astrnout Nainggolan (PDI-P), Alpeda Sinaga (Gerindra), Rajamin Sirait (Golkar), Binsar Situmorang (Gerindra-Pan). Untuk wakil wali kota ada beberapa nama sebagai bakal calon yaitu Mangatas Silalahi (Golkar), Rospita Sitorus (PDI-P), Mangasi Purba (Mantan Ketua KPU Kota Pematang Siantar) coba ikut berkompetisi untuk pemilukada tahun 2020 sebelum munculnya Pasangan Calon Tunggal tersebut.

Sesuai dengan aturan yang ada terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi sebagai calon yang

berasal dari partai politik maupun gabungan partai politik dalam tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Syarat pertama ialah partai politik maupun gabungan partai politik yang akan mengajukan calon harus memperoleh 20% kursi atau 25% suara pada pemilu legislatif sebelumnya. Syarat kedua ialah pasangan calon didaftarkan oleh partai politik pada tingkatan yang relevan. Jika pemilihan gubernur dan wakil gubernur maka pendaftarannya dilakukan oleh pengurus partai di tingkat provinsi. Sedangkan untuk pemilihan bupati maupun wali kota, maka pendaftarannya dilakukan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota yang juga melampirkan SK atau surat keputusan yang masih berlaku dari kepengurusan masing-masing pengurus partai politik yang mendaftar. Syarat yang ketiga yang harus dilengkapi adalah SK atau surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tentang persetujuan pasangan calon yang didaftarkan. Dalam hal ini KPU dapat menggagalkan calon tersebut jika ketiga itu salah satunya tidak dilengkapi dan dibawa pada pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dari penejlaasan di atas dapat disimpulkan bahwa nama-nama bakal calon yang muncul dari partai politik mendapatkan kesulitan tidak hanya dari dukungan kursi yang didapat dari DPR yang mensyaratkan minimal 6 kursi untuk dapat mencalonkan calon. Benturan lain perolehan suara oleh partai yang tidak memenuhi ketentuan pada pemilihan legislatif sebelumnya. Kemungkinan lain yang sangat besar mundurnya calon dari kompetisi pemilihan kepala daerah dalam hal ini wali kota maupun wakil wali kota tidak adanya dukungan dan persetujuan dari dewan partai pusat.

Di samping bakal calon yang hadir sebagai pesaing dalam memberi nafas pengertian demokrasi untuk pemilihan yang adil dan jujur, ada juga kesempatan untuk jalur perseorangan yang dalam konteks demokrasi memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih. Munculnya nama Ojak Naibaho dan M Efendi Siregar untuk wali kota dan wakil wali kota hadir bersaing melalui jalur perseorangan. Dalam konteks ini jalur perseorangan tidak melibatkan partai politik sebagai kendaraan politik untuk mendukung pencalonan. Walaupun demikian calon perseorangan harus

mendapat dukungan minimal 6,5%-10% dari jumlah masyarakat pemilih.

Pasal 42 UU nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada dengan tegas mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa kartu identitas penduduk (KTP) sebagai 6,5%-10% dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Untuk itu KPU juga harus melakukan verifikasi faktual melalui jajarannya ditingkat kecamatan dan kelurahan guna menguji keabsahan dukungan tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat disederhanakan bahwa baik calon dari partai politik ataupun perseorangan secara umum harus melalui tahapan yang sudah dirancang oleh KPU Kota Pematang Siantar dengan proses pemeriksaan berkas. Kemudian pasangan calon dari partai politik yang sudah ditandatangani bagian teknis dari pemeriksaan berkas di KPU baik itu calon dari partai politik maupun perseorangan. Untuk partai politik mereka berproses di dalam partai politik atau berproses juga di luar internal partai politik dalam arti untuk perseorangan. Mereka harus melalui proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya di kecamatan dan kelurahan. Sederhananya, untuk calon dari partai politik berdasarkan pada perolehan jumlah kursi dan penghitungan perolehan suara sah pada pemilu terakhir sementara untuk perolehan kursi calon harus mendapatkan dukungan 20% total dari kursi legislatif atau menggunakan cara melalui jumlah perolehan suara dari pemilu terakhir (Hutasoit, 2015).

Keputusan MK nomor 100/PUU-XIII/2015 merupakan jawaban dari dinamika politik di Indonesia untuk menjawab tantangan demokrasi yang menempatkan hak politik individu untuk dipilih maupun memilih. Keputusan ini merupakan jaminan berlangsungnya hak demokratis setiap individu dari masyarakat Indonesia yang memegang penuh kedaulatan untuk menentukan pilihan yang dipilih maupun memilih. Keunikan pasangan calon tunggal maupun calon perseorangan merupakan jati diri bangsa Indonesia untuk memenuhi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum sebagai bentuk wujud demokrasi.

Meskipun tidak dapat dimungkiri pilihan kata “setuju” maupun “tidak setuju” di mana

yang pertama menegaskan pemilihan langsung untuk “calon tunggal” dan yang kedua merujuk pada “kotak kosong” sebagai lambang demokrasi untuk menghadirkan pesaing dalam arti demokrasi. Dengan kata lain kontestasi demokrasi berjalan dengan baik karena hadirnya lawan bersaing meskipun melalui kotak kosong.

Kehadiran kotak kosong mengisyaratkan bahwa kedaulatan rakyat jauh lebih tinggi dari apapun dalam pengertian demokrasi. Untuk konteks pemilihan, masyarakat boleh saja mengatakan ketidaksetujuannya dengan cara memilih kotak kosong karena menurut mereka kotak kosong secara semiotika jauh lebih baik dipilih dari calon tunggal yang diusung oleh partai politik. Maka bukan menjadi sebuah kejutan ketika kekecewaan memecahkan fakta ketidakpercayaan masyarakat pada pilihan calon yang ditawarkan pada pilihan partai politik maupun sebagian masyarakat. Contoh nyata adalah pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar di mana kotak kosong memenangkan pemilihan daripada memilih petahana yang telah memimpin sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat sangat kecewa dengan kepemimpinan petahana sehingga lebih memilih kotak kosong sebagai wujud protes kekecewaan atas kepemimpinan petahana.

Contoh di atas tidak terjadi di Kota Pematang Siantar yang lebih memilih Ir. Asner Silalahi sebagai Wali Kota dan dr. Susanti Dewiyani Sp.A sebagai Wakil Wali Kota. Dalam pemilihan langsung tahun 2020 Ir. Asner Silalahi dan dr. Susanti Dewiyani Sp.A muncul sebagai calon pasangan tunggal untuk memenangkan pemilihan kepala daerah wali kota dan wakil wali kota Kota Pematang Siantar. Perlu dicatat kemenangan kedua orang ini juga mendapat perlawanan dengan hadirnya kotak kosong.

Dilansir dari laman resmi KPU RI, menurut penghitungan manual yang dilakukan, pasangan Asner-Susanti berhasil meraih total 43.919 suara dengan persentase 75,3 persen. Sementara itu, kotak kosong berhasil meraih sebanyak 14.407 suara dengan persentase sebesar 24,7 persen (<https://tirto.id/pilkada-pematangsiantar-2020-asner-susan-menang-lawan-kotak-kosong-f71o>, diakses pada 1 mei 2021 pukul 12.57 wib.). Dengan demikian pasangan Asner-Susanti dipastikan menang dalam pilkada Kota Pematang Siantar tahun

2020. Jumlah persentase di atas merupakan indikator bahwa pemilih Asner dan Susanti jauh lebih besar. Namun perlu digarisbawahi bahwa persentase kotak kosong juga merupakan indikator yang tidak setuju meskipun jumlahnya sedikit. Setidaknya kehadiran indikator baik dari sisi pasangan calon tunggal maupun kotak kosong sudah membuktikan adanya proses demokratis dalam pemilukada Kota Pematang Siantar.

Dibalik pemaparan di atas perlu juga dicatat bahwa sebenarnya peluang *incumbent*(petahana) cukup besar untuk hadir sebagai pesaing untuk membatalkan hadirnya pasangan calon tunggal. Hal ini tidak terjadi di Kota Pematang Siantar karena petahana tidak mendapat dukungan dari partai politik yang ada di Kota Pematang Siantar. Dengan demikian petahana tidak memaksakan diri untuk muncul sebagai calon wali kota maupun wakil wali kota dalam pemilukada tahun 2020 di Kota Pematang Siantar. Berbanding terbalik dengan pasangan calon tunggal yang dalam hal ini adalah Asner-Susanti yang didukung oleh semua partai. Dengan kata lain pasangan Asner-Susanti memborong semua partai yang ada di Kota Pematang Siantar untuk mempertegas dukungan terhadap hadirnya calon tunggal.

Pada sisi lain fenomena yang muncul di Kota Pematang Siantar untuk hadir sebagai pesaing sebelum adanya calon tunggal adalah hadirnya calon perseorangan yang diwakili oleh Ojak Naibaho dan M Efendi Siregar. Dinamika politik untuk pemilukada wali kota dan wakil wali kota pada dasarnya memiliki dinamika politik yang mendukung asas demokrasi. Terlepas dari beragam alasan mengapa calon dari partai politik dan calon perseorangan tidak hadir di KPU untuk memenuhi ketentuan yang berlaku menegaskan bahwa KPU Kota Pematang Siantar sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memperpanjang waktu pendaftaran. Ketidakhadiran calon dari partai politik maupun perseorangan untuk memenuhi persyaratan menjadikan KPU mensahkan adanya calon tunggal untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Pematang Siantar untuk tahun 2020.

Bila ditelisik dari logika durasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota untuk tahun 2020 pada prinsipnya hanya memangku jabatan selama dua tahun (2022-2024). Hal ini bisa

terjadi karena petahana (Hefriansyah yang seyogianya adalah wakil wali kota dari Hulman Sitorus yang terpilih sebagai wali kota namun meninggal sebelum pelantikan). Meninggalnya Hulman Sitorus digantikan oleh Hefriansyah yang dilantik pada tahun 2017 dan mengakhiri jabatannya di 2022. Penundaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Pematang Siantar karena adanya kasus sela pengadilan mengakibatkan pemilukada 2015 dilanjutkan ke 2016 dengan pelantikan 2017.

Keunikan fakta ini yang menegaskan pemangku jabatan hanya dua tahun menjadikan pertanyaan besar mengapa ada keinginan untuk memiliki jabatan tersebut. Kemungkinan calon lain (calon dari partai politik maupun perseorangan boleh jadi mundur karena alasan durasi jabatan ini). Meskipun pernyataan ini hanya sekedar dugaan atau hipotesis, namun kemungkinan durasi yang terbatas untuk menjabat menjadi alasan yang kuat untuk mundur. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa kehadiran sosok Ir Asner Silalhi sebagai tokoh yang memiliki kharisma dan berdedikasi untuk memajukan Kota Pematang Siantar, ini menjadi alasan mengapa beliau mau untuk memimpin kota Pematang Siantar. Pernyataan ini diperoleh melalui wawancara dengan Ronald Tampubolon S.H yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pematang Siantar.

Munculnya dukungan pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar tidak terlepas dari pengaruh elektabilitas calon tunggal yang dalam hal ini diwakili oleh Asner-Susanti. Kharisma keduanya mendapat dukungan penuh dari masyarakat Pematang Siantar untuk menjadikan pasangan ini terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun sebelum pelantikan, wali kota terpilih meninggal dunia dikarenakan sakit yang membuat posisi wali kota menjadi kosong.

Keunikan lain terjadi untuk mengulangi sejarah yang sebelumnya di Pemilukada tahun 2016 yang seharusnya di 2015. Di pemilukada tahun 2016 wakil wali kota secara otomatis duduk sebagai wali kota menggantikan wali kota terpilih (Hulman Sitorus) yang meninggal sebelum pelantikan. Peristiwa ini terjadi lagi di pemilukada tahun 2020 di mana wakil wali kota terpilih (Susanti) bakal menjadi wali kota menggantikan wali kota terpilih (Ir Asner Silalhi) yang meninggal sebelum pelantikan.

Ahmad Rasyid Ritonga, Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sumut menyatakan Pelantikan Kepala Daerah 2020 gelombang III dijadwalkan bakal dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021. Pelantikan Kepala Daerah khusus untuk Pematang Siantar seyogianya akhir masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada bulan februari 2022. Namun sesuai keputusan dari Kementrian Dalam Negeri maka pelantikannya dipercepat pada juli 2021. Rasyid mengungkapkan, di Indonesia selain Pematang Siantar, ada dua kabupaten di dua provinsi lain mengalami hal sama, yakni masing-masing satu di Sulawesi Tenggara dan satu di Papua. Siantar kepala daerahnya bakal dapat kompensasi. Selain Siantar ada dua daerah lain di Sulawesi dan Papua. Dikatakan Rasyid, Wali Kota Hefriansyah Noor pun telah dipanggil Kemendagri dan disebut sudah ada kesepakatan terkait hal tersebut. Kompensasinya, gaji dan tunjangan sampai masa jabatannya berakhir dibayarkan penuh. Wali kotanya juga sudah pernah dipanggil soal ini. Dan sudah ada kesepakatan. Sementara itu, dari lima daerah tersebut, tiga di antaranya baru melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU), yakni Labuhan Batu, Labusel, dan Madina. Dan rencananya rapat pleno penetapan pasangan kepala daerah terpilih di tiga daerah tersebut, dijadwalkan baru akan dilakukan pada 30 april-3 mei 2021 (Pelantikan Kepala Daerah Siantar Dijadwalkan Juli 2021. Tribun Medan. Jumat 30 April 2021. Hal 10).

Kegagalan Partai Politik

Kemenangan pasangan calon tunggal pemilukada di Kota Pematang Siantar diwarnai dengan hadirnya borong partai. Fakta ini menunjukkan bahwa sejarah perjalanan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Pematang Siantar membuka sejarah baru yang sebelumnya memiliki calon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 10 pasangan calon. Menyimak pernyataan pengamat politik Kota Pematang Siantar bapak Zainul Arifin Siregar menegaskan bahwa perjalanan sejarah politik Kota Pematang Siantar memiliki keunikannya sendiri. Sejarah menjadi catatan namun fakta sejarah menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan hadirnya pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar. Dengan kata lain, regulasi menghendaki kehadiran pasangan calon tunggal sebagai warna politik tidak hanya

di Kota Pematang Siantar tetapi diseluruh Indonesia.

Keberadaan petahana sebenarnya memiliki peluang besar untuk tampil sebagai kekuatan menghempang hadirnya pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar. Sebaliknya peluang ini menjadi tertutup dikarenakan petahana sendiri mengalami pemakzulan sebanyak dua kali oleh DPRD Kota Pematang Siantar. Kenyataan ini menurut pengamat mengurangi harga jual politik petahana itu sendiri. Dengan demikian eksese dari kejadian ini menggiring partai politik di Kota Pematang Siantar menjadi ragu untuk menggandeng petahana sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pematang Siantar untuk tahun 2020-2024. Keenggan partai politik untuk mendukung petahana sama dengan pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD Kota Pematang Siantar terhadap petahana sebanyak dua kali.

Pandangan pengamat politik Kota Pematang Siantar mengamini keadaan ini sebagai sesuatu kegagalan petahana dalam memimpin Kota Pematang Siantar. Pemakzulan itu sendiri sudah merupakan indikator bahwa petahana secara politik gagal membangun komunikasi politik untuk keberhasilan membangun Kota Pematang Siantar. Munculnya pasangan calon tunggal dalam hal ini bapak Ir. Asner Silalahi memiliki kharisma dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa beliau dan pasangannya merupakan profil yang cocok untuk memimpin Kota Pematang Siantar. Singkat kata, komunikasi yang dibangun pasangan calon tunggal Kota Pematang Siantar mendapat dukungan penuh dari lapisan masyarakat dan juga partai politik yang menghadirkan adanya borong partai untuk kemenangan pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar.

Berkaitan dengan pemilihan calon tunggal dalam konteks pemilu mencirikan adanya kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pito, 2019).

Peran partai politik dalam menentukan kebijakan orientasi partai untuk mendukung pasangan calon tidak terlepas dari sekumpulan orang atau individu yang memiliki kekhususan atau dianggap superior dibanding masa kebanyakan. Mochtar Masoed menegaskan hadirnya konsep elit merujuk pada sekumpulan orang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan, baik kelompok dilingkaran kekuasaan ataupun kelompok yang sedang berkuasa. keunggulan elit atas massa sepenuhnya tergantung pada keberhasilan kelompok elit dalam memanipulasi lingkungannya dengan simbol-simbol, kebaikan-kebaikan atau tindakan-tindakan (Masoed & Colin, 2006).

Dari apa yang digambarkan di atas berjalan seiring dengan profil munculan pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar dalam arti pasangan Ir Asner Silalahi sebagai calon wali kota dan dr. Susanti Dewipayani Sp.Ak sebagai calon wakil wali kota. Dari hasil interview peneliti didapat keterangan bahwa sosok Ir Asner Silalahi cukup kompeten untuk memajukan Kota Pematang Siantar kehadiran beliau juga tidak dapat dimungkiri masuk pada golongan kategori elite tidak hanya kedudukannya sebagai ASN namun juga memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni. Kehadirannya yang sopan, berkarisma, *humble*, dan *low profile* menjadikan sosok Ir Asner Silalahi sebagai idola yang didukung oleh masyarakat. singkatnya, elitisme Ir Asner Silalahi memperkokoh elektabilitas sebagai pemimpin Kota Pematang Siantar khususnya untuk jabatan wali kota.

Konsep elit dalam profil pasangan calon tunggal dalam pemilihan langsung di Kota Pematang Siantar tidak dapat ditolak mengambil peran penting untuk memenangkan pemilu. Maka tidak salah elitisme dalam arti munculnya kelas atas dalam tatanan sosial dengan kemampuan ekonomi yang lebih atau dengan kata lain pemilik produksi dapat juga mempunyai kekuasaan yang dengan sendirinya memiliki daya pengaruh terhadap masyarakat. Pemilik produksi atau orang kaya dapat juga mempengaruhi penguasa atau bahkan kaum elite karena mereka sudah berada pada lingkaran kaum elite itu sendiri dalam arti

memiliki pengaruh dan kekuasaan. Lebih jelasnya kaum pemilik produksi atau orang kaya bersinonim dengan kaum borjuis.

Dari pengamatan peneliti melalui interview terbuka dengan para pengurus partai politik di Kota Pematang Siantar baik itu pengurus Partai Politik PDIP, HANURA, GOLKAR, dan Nasdem didapat informasi bahwa ada kecendrungan orang kuat lokal (*local strongman*) dan diperlakukan juga sebagai bos lokal (*local bossism*) mewarnai kehadiran calon tunggal di Kota Pematang Siantar. Senada dengan Leo Agustino yang menengarai fenomena politik lokal di Indonesia menumbuhkan kekuatan-kekuatan lokal baru yang ia sebut dengan bos lokal dan orang kuat lokal (Agustino, 2009).

Kehadiran orang kuat lokal atau bos lokal setidaknya memiliki sejarah yang panjang dari perjalanan sejarah bangsa di Indonesia khususnya berkaitan dengan politik Orde Baru. Dengan kasat mata tidak bisa dikatakan bahwa pemilik modal memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar tidak hanya di tingkat lokal bahkan juga di tingkat pusat. Orang-orang yang memiliki sumber kapital tidak terbatas dengan hadirnya reformasi memperkuat kedudukannya setelah runtuhnya orde baru. Dengan kata lain pengaruh orang-orang elit baik yang ada di partai maupun di luar partai sepertinya memiliki kekuasaan untuk menentukan pemerintahan. Dengan kata lain kaum elit politik dan non politik memiliki kebijaksanaan yang dapat mengatur apa yang mereka inginkan. Situasi ini secara implisit terjadi juga di Kota Pematang Siantar dengan hadirnya pasangan calon tunggal dalam pemilukada wali kota dan wakil wali kota.

Pemilu yang langsung, bebas, dan rahasia yang terlahir dari adanya reformasi di Indonesia mengalami perubahan atau dinamika politik yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dominasi calon tunggal sepertinya tidak dapat dibendung sebagai wujud dari demokrasi itu sendiri. Puluhan calon tunggal di pilkada 2020 berpotensi memenangi kontestasi. Kondisi itu dikhawatirkan membuat calon tunggal menjadi strategi memenangi pilkada dan ini pertanda buruk dalam praktik demokrasi. Raihan suara 24 dari 25 pasangan calon kepala, wakil kepala daerah, pasangan calon tunggal di pemilihan kepala daerah 2020 jauh mengungguli jumlah pemilih yang memilih kotak kosong. Jika

kondisi ini bertahan hingga calon terpilih ditetapkan komisi Pemilihan Umum, berarti tren kemenangan calon tunggal di pilkada menguat. Hal ini dikhawatirkan akan mendorong semakin banyak calon tunggal muncul di pilkada yang akhirnya mengikis demokrasi.

Anggota dewan pembina perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan istilah defisit atau erosi demokrasi sangat tepat untuk merefleksikan dominasi calon tunggal di setiap pilkada. Sebab, keberadaan calon tunggal mencederai nilai-nilai demokrasi sebagai kompetisi yang inklusif dan berbasis gagasan. Tren kemenangan paslon tunggal yang menguat justru dijadikan sebagai strategi oleh parpol atau bakal calon di pilkada sebagai cara manjur untuk menang saat pilkada. Ini pertanda buruk bagi demokrasi lokal.

Titi berharap pencalonan di pilkada selanjutnya membuka ruang lebih besar bagi kehadiran calon. Caranya dengan menghapuskan ambang batas pencalonan kepala-wakil kepala daerah, menggelar pilkada serentak dengan pemilu anggota DPRD, dan menurunkan syarat dukungan dari perseorangan. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, ambang batas pencalonan dari parpol minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah dalam pemilu DPRD. Adapun untuk calon perseorangan, syaratnya berkisar 6,5 persen sampai 20 persen dari total daftar pemilih tetap (Bow, 2020)

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa fungsi dan peran partai politik cukup menentukan arah demokasi dalam hal ini pemilukada di Indonesia. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik yang sering disebut sebagai perantara ide atau sebagai pendegar dari pengeras suara rakyat. Singkatnya partai politik berperan sebagai jembatan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dalam mengembangkan kebijakan politik dalam suatu pemerintahan. Keunikan pemilukada langsung yang terjadi di Kota Pematang Siantar merupakan sebuah indikator gagalnya partai politik menghadirkan calon yang mewakili partai tersebut.

Dari wawancara peneliti diperoleh informasi bahwa Ir Asner Silalahi dan Susanti di dukung oleh semua partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pematang Siantar. Perlu

menjadi catatan bahwa partai PDIP Kota Pematang Siantar pada prinsipnya memiliki calon untuk di majukan karena sudah memperoleh 8 kursi yang duduk di DPRD dan berhak mengajukan calonnya. Dalam hal ini partai PDI-Perjuangan bukan tidak memiliki calon atau kader untuk dimajukan. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan tidak sama halnya dengan partai politik. Dengan kata lain partai politik lokal harus mendapat persetujuan dari dewan pimpinan pusat. Keputusan kebijakan ini menjadi penghalang untuk mengajukan calon dari daerah sesuai dengan keinginan daerah masih bisa bersebrangan dengan dewan pimpinan pusat.

Peristiwa borong partai yang dilakukan oleh Ir Asner Silalahi-Susanti Dewapayani sebagai calon tunggal untuk pemilihan wali kota bersama wakilnya dr. Susanti Dewapayani Sp.A sebagai calon wali kota mendapat dukungan dari partai politik dalam arti peran partai sebagai penyambung ide dan gagasan untuk mengusung calon. Partai politik memiliki pertimbangan tersendiri untuk mendukung calon pemimpin daerah yang tidak bersebrangan dengan keinginan masyarakat yang dalam hal ini Kota Pematang Siantar.

Partai politik sebagai sarana sosialisai partai politik di Kota Pematang Siantar mengedepankan proses terhadap orientasi politik yang berlaku dalam masyarakat. Partai politik dengan kata lain menentukan sikap politik seseorang misalnya nasionalisme, kelas sosial, ideologi, dedikasi, dan kharisma yang semuanya dimiliki sosok seperti Ir Asner Silalahi. Keterlibatannya dengan tidak melihat durasi kepemimpinan sebagai calon wali kota tidak menghalanginya untuk tampil sebagai pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kota Pematang Siantar. Adapun partai politik yang ada di Kota Pematang Siantar dan mendapatkan kursi di DPRD adalah sebagai berikut:

Munculnya fenomena calon tunggal pada dasarnya dikarenakan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi partai untuk memenangkan pasangan calon tunggal. Hal ini dikuatkan kembali oleh Maryam Nur Hidayati yang mengatakan partai politik sebagai representasi dari aspirasi masyarakat diberikan hak khusus

yaitu dalam pengajuan calon kepala daerah. Partai politik mempunyai kewajiban mengajukan pasangan calon karena mereka mempunyai suara dan kursi. Selain itu, partai politik adalah institusi yang sah dan *legitimate* untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, tanggung jawab partai politik untuk menyediakan kandidat-kandidat untuk mengisi jabatan publik seharusnya menjadi agenda utama dalam kegiatan partai (Rohim, 2017).

Pada prinsipnya merupakan suatu pertanyaan besar dalam ranah demokrasi ketika pemilu membutuhkan kompetitior atau pesaing, sebaliknya partai PDI-P di Kota Pematang Siantar justru tidak memajukan calon. Meskipun faktanya kehadiran calon tunggal dalam pemilu sering dipahami sebagai defisit atau erosi demokrasi bukan merupakan sebuah harga mati untuk mengajukan calon. Alasan politik untuk menghadirkan calon tunggal juga memiliki dasar hukum yang menghargai hak warga untuk dipilih dan memilih. Dalam situasi seperti ini partai PDI-P Kota Pematang Siantar mengikuti aspirasi masyarakat Kota Pematang Siantar yang menghendaki Ir. Asner Silalahi dan dr. Susanti untuk maju sebagai pasangan calon tunggal.

Munculnya fenomena "borong partai" menegaskan kuatnya pengaruh individu Ir Asner Silalahi demikian juga dukungan masyarakat yang menjadikan elektabilitas Ir. Asner Silalahi sebagai calon tunggal mendapat dukungan penuh. Dalam hal ini partai politik di Kota Pematang Siantar mengambil jalan pintas atau aman dengan mendukung pasangan calon tunggal yang dikehendaki oleh masyarakat. Meskipun secara implisit, masing-masing partai ketika diwawancari menegaskan bahwa mereka selalu siap mengajukan calon untuk diusung dalam pilukada 2020 di Kota Pematang Siantar. Alasan klise yang dimajukan sepertinya berkutat pada profil individu yang memiliki nilai jual atau elektabilitas yang hendak ditawarkan. Pada poin ini nilai jual dan elektabilitas tersebut ada pada sosok Ir Asner Silalahi - dr. Susanti untuk pilukada 2020. Secara implisit sebenarnya partai-partai politik di Kota Pematang Siantar tidak menyiapkan kadernya untuk mampu bersaing atau berkontestasi pada pilukada wali kota dan wakil wali kota di Kota Pematang Siantar.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan partai politik setidaknya berbanding lurus

dengan keinginan masyarakat. terlepas dari kontroversi bahwa kehadiran calon tunggal dalam demokrasi merupakan sesuatu yang melanggar ranah demokrasi itu sendiri. Namun pada sisi lain kehadiran calon tunggal juga untuk merealisasikan nafas demokrasi untuk menghargai hak setiap individu untuk dipilih maupun memilih dalam pemilukada. Maka dengan itu Keputusan MK nomor 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diikuti penerbitan peraturan KPU RI nomor 14 tahun 2015 merupakan kekuatan hukum ataupun yuridis formal untuk menegakan demokrasi itu sendiri.

Terlepas dari pengertian bahwa kehadiran calon tunggal merupakan pertanda buruk legalisasi demokrasi, fakta yang terjadi menegaskan bahwa kehadiran pasangan calon tunggal juga mendapat dukungan dari masyarakat yang menjadi roh dari demokrasi itu sendiri. Pilihan yang datang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai suara demokrasi mempertegas legalitas dari hadirnya calon tunggal itu sendiri. Kemenangan pasangan calon tunggal di Kota Pematang Siantar yang didukung oleh semua partai politik yang duduk di DPRD Kota Pematang Siantar mewarnai pemilukada 2020 untuk kemenangan pasangan calon tunggal wali kota dan wakil wali kota menandai sejarah reformasi politik di Kota Pematang Siantar.

Peran dan fungsi partai politik di Kota Pematang Siantar sebagai sarana jembatan aspirasi boleh dikatakan mendukung keinginan masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa partai politik yang merepresentasikan kebijakan politik untuk partai dan masyarakat pada dasarnya tidak berjalan dengan baik di Kota Pematang Siantar. Suka atau tidak suka demokrasi dalam arti pemilu setidaknya menghadirkan kompetisi untuk menggiring masyarakat menentukan pilihan mana yang pantas untuk dipilih. Kehadiran kota kosong untuk bersaing melawan calon tunggal hanya berupa simbolik demokrasi yang pada prinsipnya minus kompetisi. Seyogianya partai politik memiliki peran kuat untuk menghadirkan kadernya dalam menjalankan roda demokrasi dengan pemerintahan yang demokratis pula.

Fenomena calon tunggal dalam pilkada serentak untuk wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar menghadirkan dinamika politik sebagai perwujudan reformasi bagi masyarakat Kota Pematang Siantar pada

khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kehadiran calon tunggal dalam pilkada kepala daerah mengindikasikan perubahan pada tatanan demokrasi dengan hadirnya kolom kosong sebagai bagian dari kontestasi pemilukada di Kota Pematang Siantar.

Perhelatan pemilukada Kota Pematang Siantar tahun 2020 untuk wali kota dan wakil wali kota di Kota Pematang Siantar menghadirkan catatan sejarah terjadi untuk pertama kali dalam tatanan roda pemerintahan yang diwakili oleh rakyat melalui calon tunggal. Terlepas dari kontroversi mengenai kehadiran kolom kosong yang sepertinya menolak keabsahan demokrasi dalam arti memilih maupun dipilih karena tidak hadirnya kontestasi. Fakta menunjukkan bahwa ketiadaan calon baik dari partai politik maupun dari calon perseorangan, secara konstitusional melegitimasi hadirnya calon tunggal. Dengan kata lain hadirnya pilkada sudah mewujudkan makna dari demokrasi itu sendiri yang dalam arti kedaulatan rakyat di satu sisi dan konstitusi yang menjamin hak rakyat di lain sisi.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui wawancara terjadinya calon tunggal di karenakan pada hari pendaftaran hanya ada satu calon tunggal atas nama Ir Asner Silalahi untuk jabatan wali kota dan dr. Susanti Dewapayani sebagai calon wakil wali kota. KPU Kota Pematang Siantar sudah mengundurkan batas pendaftaran untuk calon yang ingin mendaftar namun faktanya sampai batas akhir hanya satu yang muncul. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa hak individu untuk dipilih harusnya dilaksanakan sesuai dengan konstitusi yang menegaskan bahwa setiap orang berhak dipilih. Mahkamah Konstitusi jika dilakukan penundaan tidak hanya menghalangi hak konstitusi perorangan melainkan juga melanggar konsep demokrasi. Terlepas dari substansi demokrasi dalam arti adanya kontestasi maka proses konstitusi dalam pemilihan juga harus dipertimbangkan. Hal yang seperti inilah yang terjadi di Kota Pematang Siantar.

Kehadiran calon tunggal untuk bersaing dengan kolom kosong dalam pemilukada Kota Pematang Siantar tahun 2020 mencatatkan hadirnya peristiwa borong partai untuk mendukung calon tunggal. Dukungan ini menegaskan adanya hak memilih yang terjadi pada kebijakan partai politik yang dengan sendirinya juga diikuti oleh masyarakat. perlu

menjadi catatan bahwa hak memilih untuk kotak kosong menandai “ya” untuk kosong atau “tidak” untuk calon tunggal. Kehadiran pemahaman dua sisi ini “ya” untuk setuju dan “tidak” untuk setuju kotak kosong atau tidak setuju calon tunggal sepertinya membatasi hak memilih oleh masyarakat.

Mohammad Alexander mengatakan bahwa “sebagai produk dari dinamika politik lokal, calon tunggal dalam pilkada memberikan alternatif untuk tercapainya partisipasi dalam rangka menghindari kerugian hak konstitusi dari warga negara dan calon yang maju akan tetapi disisi lain menempatkan pilkada sebagai *uncontested election* yang mana *uncontested election* akan mendegradasi unsur partisipasi dalam demokrasi” (Alexander, 2015). Dari pernyataan ini dapat ditegaskan bahwa KPU tidak bisa berbuat banyak apabila muncul calon tunggal didalam penyelenggaraan pilkada di satu daerah yang dalam hal ini Kota Pematang Siantar. Adapun langkah yang bisa diambil KPU di Kota Pematang Siantar secara khusus dan KPU secara umum hanya bisa membuka kembali persyaratan pasangan calon hingga ditemukan ada penantang bagi pasangan tersebut.

Menurut Sa’dudin hak asasi manusia (HAM) dijunjung tinggi sejak lahirnya NKRI tahun 1945. Sikap tersebut tertuang pada pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM. Sehingga pada praktik penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen rights*) atau hak-hak konstitusional warga Negara (*the citizen constitutional rights*) dapat terlaksana (Sa’duddin, Pengaturan Hak Politik Warga Negara dikutip dari <http://www.dakta/news/1949>. Diakses pada 11 mei 2020 pukul 14.47 wib.). Dengan adanya penegakan terhadap HAM berjalan selaras dengan hadirnya hak memberikan suara atau memilih yang menjadi hak dasar setiap individu di mana negara wajib menjamin pemenuhan hak tiap individu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan adalah setara dalam pengambilan keputusan apakah untuk memilih atau dipilih.

Jika dicermati dari persepektif hak memilih dan dipilih, konteks pilkada yang diikuti calon tunggal di Kota Pematang Siantar hanya berkutat pada unsur partisipasi warga

negara dalam menentukan pemimpinnya. Terlepas dari pemikiran ini, sebaliknya dalam konteks kontestasi pemilihan ini sepertinya menggiring masyarakat untuk memenuhi pilihan apakah memilih pasangan calon tunggal atau pilihan kotak kosong untuk mempertegas persetujuan. Pilihan yang dilakukan oleh masyarakat baik untuk calon tunggal maupun kotak kosong sebenarnya merepresentasi adanya keterbatasan hak pilih.

Apa yang terjadi di Kota Pematang Siantar merujuk pada legitimasi hak pilih yang dalam hal ini merujuk pada calon tunggal sudah mewakili kehendak rakyat Kota Pematang Siantar untuk menentukan pilihannya. Adanya penundaan untuk menghadirkan saingan pasangan calon tunggal sudah menunjukkan adanya keadilan tanpa membatasi hak untuk dipilih maupun memilih bagi calon perseorangan maupun calon yang didukung oleh partai politik. Penundaan yang dilakukan oleh KPU sebelum pendaftaran terakhir menegaskan adanya keadilan untuk memilih maupun dipilih. Ketika tidak satupun bakal calon yang mendaftar ulang maka kehadiran calon tunggal tidak dapat ditolak sudah memenuhi hak konstitusional untuk dipilih.

Khusus untuk Kota Pematang Siantar hak pilih terhadap calon tunggal wali kota dan wakil wali kota pada pemilihan langsung tahun 2020 mewarnai dinamika perpolitikan di Kota Pematang Siantar. Kehadiran calon tunggal untuk dipilih bersaing dengan kotak kosong merupakan wujud dari bentuk demokrasi setelah reformasi di negara Republik Indonesia. Kemenangan calon tunggal atas nama Ir Asner Silalahi sebagai wali kota dan dr. Susanti Dewapayani Sp.Ak sebagai wakil wali kota sudah memenuhi kehendak rakyat untuk menjalankan jabatan publik di pemerintahan Kota Pematang Siantar.

Kemenangan Ir Asner Silalahi pada akhirnya harus dilanjutkan oleh wakilnya disebabkan sebelum pelantikan untuk merayakan kemenangan beliau sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kejadian yang sama terjadi pada pilkada sebelumnya namun tidak dengan pasangan calon tunggal. Sebelum pelantikan dilakukan wali kota terpilih Hulman Sitorus meninggal dunia yang kemudian digantikan oleh Wakil Wali Kota Hefriansyah Noor menjadi Wali Kota. Dua peristiwa yang sama untuk wali kota namun dengan pemilihan yang berbeda setidaknya menjadi sejarah yang

unik dalam perjalanan roda perpolitikan pemerintahan Kota Pematang Siantar khususnya untuk jabatan wali kota. Terlepas dari peristiwa yang ada pelaksanaan hak pilih dalam pilkada langsung calon tunggal Kota Pematang Siantar menegaskan demokrasi merupakan suatu tonggak sejarah dalam rangka pemilihan kepala daerah. Pemilihan dijadikan alat dalam memperpanjang tangan masyarakat menjalankan roda pemerintahan melalui hak pilih yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hak asasi manusia.

SIMPULAN

Proses pemilukada dengan menghadirkan pasangan calon tunggal pada dasarnya untuk memenuhi kedaulatan hak-hak rakyat melalui instrumen pemilu. Dari sudut pandang demokrasi, pemilu merupakan jembatan yang menjamin hak individu untuk dipilih maupun memilih. Dengan demikian proses yang mensyaratkan aturan yang harus dipenuhi menjadikan pemilu dapat berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Proses pemilukada di Kota Pematang Siantar sudah berjalan secara demokratis di mana calon pasangan tunggal untuk memimpin di Kota Pematang Siantar hanya dipenuhi oleh pasangan calon tunggal. Dengan demikian proses pemilukada Kota Pematang Siantar untuk jabatan publik Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memenuhi aspek konstitusional yang demokratis. Secara substansi calon tunggal berlawanan dengan asas demokrasi dengan hadirnya kotak kosong sebagai hak pilih di satu sisi dan calon tunggal di sisi lain. Demokrasi yang seyogianya menghadirkan pemilihan dengan berkompetisi tidak dapat diperoleh dengan hadirnya calon tunggal. Namun pada tataran konstitusi dalam arti prosedur setiap orang berhak untuk dipilih maupun memilih. Berkenan dengan hadirnya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU/XIII 2015 merupakan alasan yang memiliki dasar hukum untuk menghadirkan calon tunggal sebagai bagian dari hak pilih dalam pemilukada serentak. Berkaitan dengan ini konstitusi menjamin bahwa penundaan karena alasan calon tunggal dilakukan hal ini melanggar hak konstitusi perorangan untuk dipilih. Dengan demikian hak memilih dan dipilih merupakan amanat konstitusi dengan menjunjung hak asasi manusia yang menjadi dasar filososfis UU Dasar 1945 yang menjadi landasan ideologi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain hak memilih dan dipilih merupakan suatu jaminan untuk menegakan kedaulatan rakyat melalui pemilu meskipun dengan hadirnya calon tunggal. Keterbatasan wewenang partai politik di tingkat daerah juga merupakan faktor penghambat munculnya kader dari partai politik salah satu keterbatasan yang mendasar adalah besarnya pengaruh elit partai politik di tingkat pusat dalam membuat kebijakan partai untuk kandidat pilkada. Fenomena ini dengan sendirinya tidak berbanding lurus dengan otonomi yang ada di daerah namun tidak ada di partai politik untuk menentukan kebijakan. Dengan demikian kandidat potensial yang diusulkan parpol pada tingkat kota berhadapan dengan politik oligarki. Dengan kata lain politik oligarkhi masih dominan berorientasi pada keputusan pusat untuk menentukan strategi politik sentralitas. Hal ini yang terjadi di pemilukada langsung Kota Pematang Siantar tahun 2020 yang mememuluskan hadirnya calon tunggal bahkan kesediaan calon tunggal untuk memborong semua partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, B.L., (2004), *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. Boston: Pearson.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agustino, L. (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Masoed, M, dan Andrew, M.C., (2006). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pito, (2019). *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Yin, K.R. (2011), *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press,
- Ni'matul, H., dan Nasef, M.I., (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana.
- Lestari, A. (2019). *Penyebab Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. *Simbur Cahaya*, 25(2), 249-262.
- Syahrial, I., dan Herdiana, D., (2020). *Calon Tunggal dan Kemenangan Kotak Kosong sebagai Sebuah Realita Demokrasi di Tingkat Lokal*, *Nagari Law Review*. 3(1), 13-26
- Rumesten, I., (2016). *Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi*. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 72-94.
- Ilham, T. (2020). *Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Ilmiah*

- Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(2), 62-73.
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten. *Jurnal HAM*, 9(2), 103-119.
- Yunus, N. R. (2018). Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik. *ADALAH*, 1(4).
- Prihatmono, A.R., (2017). Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Pati Tahun 2017: Suatu Tinjauan Oligarkhisme Parpol. Perpustakaan Universitas Airlangga: Skripsi.
- Hutasoit, H.S. (2018), Analisis Tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pematang Siantar Tahun 2015. Medan: Universitas Sumatera Utara. Tesis
- Alexander, M. (2015). "Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Kabupaten Blitar. Surabaya: Universitas Airlangga. Tesis.
- Dokumen Resmi Dari Sekretariat Negara. Penyelenggara Pemilihan Umum. Jakarta: Trans Media Pustaka. 2014.
- BPS Kota Pematang Siantar 2020.
- SE KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.
- SK BNPB Nomor 13.A tahun 2020.
- Surat Bawaslu RI Nomor S-0235/K. Bawaslu/PM.00.00/2020.
- SK KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU III/2020.
- Rapat Koordinasi bersama KPU dan Bawaslu Kota Pematang Siantar, Bawaslu.
- Putusan PTUN Nomor: 98/G2015 pada 08 Desember 2015.
- Bow, Sya, Pds. "Dominasi Calon Tunggal Tak Terbandung". *Kompas* 11 Desember 2020.
- www.pematang.siantarkota.go.id. diakses pada 15 Februari 2021 pukul 20.42 wib.
- Thahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI), 2018, "Kotak Kosong Menang di Pilkada Makassar, Mendagri Tunggu Real Count KPU", <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3573363/kotak-kosong-menang-di-pilkada-makassar-mendagri-tunggu-real-count-kpu>, diunduh 27 februari 2021, pukul 16.51 wib.
- <http://www.siantarnews.co/topik/masalah/165/pilkada-serentak-2015> diakses pada 29 april 2021 pukul 08.56.wib.
- <http://regional.kompas.com/read/2015/11/18/05013581/Tiga.Anggota.Panwaslu.Siantar.Diberhentikan> diakses pada kamis 29 april 2021 pukul 21.05
- <http://www.hetanews.com/article/59278/hari-ini-kpud-siantar-daftarkan-kasasi-ke-ptun-medan> diakses pada kamis 29 april 2021 pukul 21.13 wib.
- <https://tirto.id/pilkada-pematangsiantar-2020-asner-susan-menang-lawan-kotak-kosong-f71o>. diakses pada 1 mei 2021 pukul 12.57 wib.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/berita/pilkada-ditunda-desember-jokowi-teken-perppu-nomor-22020>. diakses pada 8 mei 2021 pukul 12.27 wib.
- Sa'duddin, Pengaturan Hak Politik Warga Negara dikutip dari <http://www.dakta/news/1949>. Diakses pada 11 mei 2020 pukul 14.47 wib.